

BAB I PENJELASAN UMUM

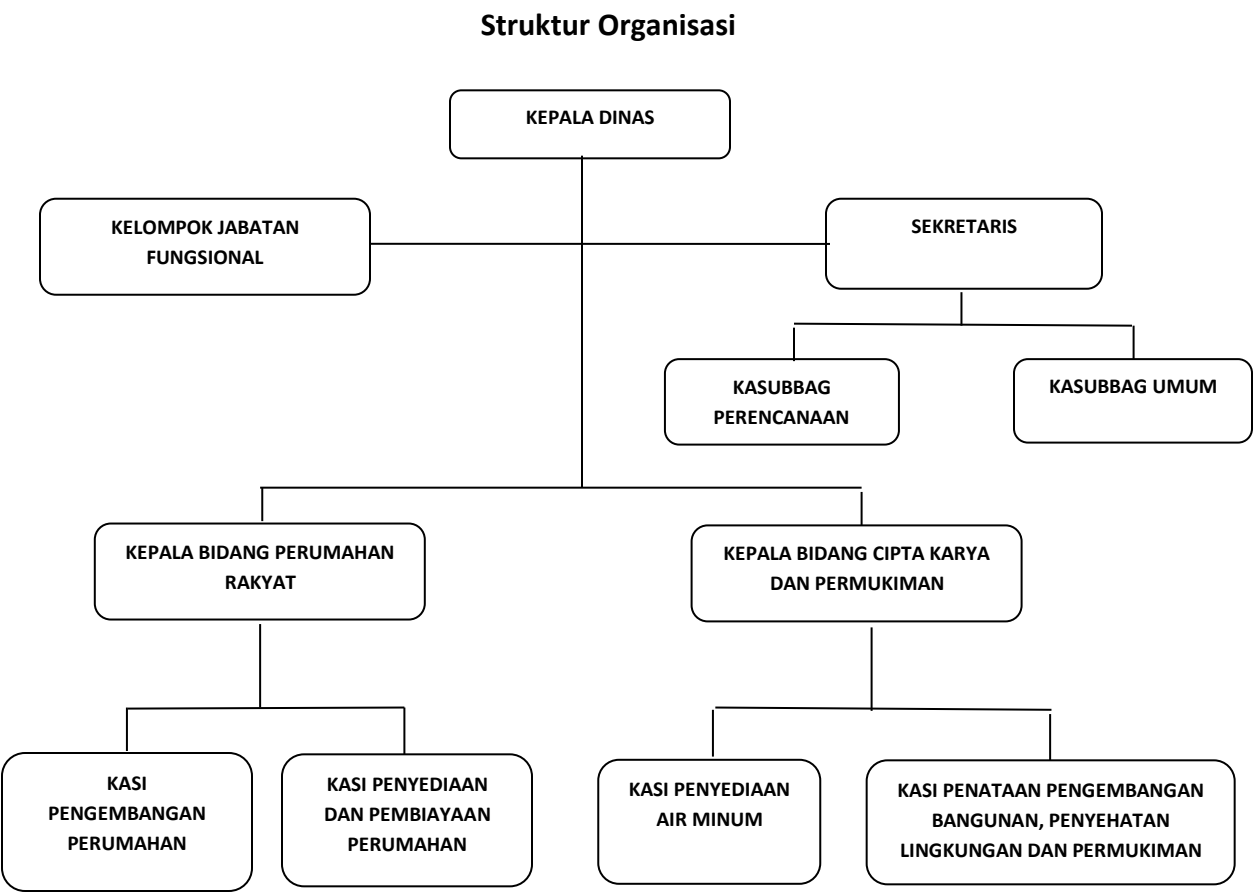
A. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016). Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah dan pecah menjadi 2 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diuraikan sebagai berikut :



Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 sebanyak 48 Aparatur Sipil Negara dengan formasi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL	PERSENTASE
Gol. IV	9	-	9	18,75 %
Gol. III	26	3	29	60,41 %
Gol.II	8	2	10	20,84 %
Gol. I	-	-	-	- %
Jumlah	43	5	48	100,00 %

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS/ CPNS	PERSENTASE
S3	0	0 %
S2	10	20,83 %
S1	25	52,08 %
D.IV	2	4,18 %
D. III	4	8,36 %
D. II	-	- %
D.I	-	- %
SMA/ sederajat	7	14,55 %
SMP/ sederajat	-	- %
SD / sederajat	-	- %
Jumlah	48	100,0 %

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

RINCIAN	JML PNS	PROSENTASE
Struktural		
- eselon II	1	10 %
- eselon III	3	30 %
- eselon IV	6	60 %
Jumlah	10	100,00%

B. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ,Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

- f. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- g. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
- h. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.59 tahun 2008
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, NoReg Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: 11/2015)
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
- n. Peraturan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung No. 10 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A)
- o. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(L R A)


A. Penjelasan Umum LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada semester kedua tahun anggaran 2019 sebesar **Rp 21.047.755.139,23 (dua puluh satu milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen)** atau tercapai 93,47 % dari total anggaran tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA SKPD sebesar **Rp 22.516.991.649,68 (dua puluh dua milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen).**

Bila dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. -4.117.625.919,77 atau -16,36%. Hal ini disebabkan karena Jumlah anggaran yang lebih kecil dari tahun 2018.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Bidang Pemerintahan : 1.04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Unit Organisasi : 1.04.01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	BELANJA	22.516.991.649,68	21.047.755.139,23	93,47	
5.1	BELANJA OPERASI	21.943.318.856,68	20.498.420.724,23	93,42	
5.1.1	Belanja Pegawai	6.500.305.839,68	5.958.134.145,00	91,66	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.443.013.017,00	14.540.286.579,23	94,15	
5.2	BELANJA MODAL	573.672.793,00	549.334.415,00	95,76	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.672.793,00	549.334.415,00	95,76	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.516.991.649,68)	(21.047.755.139,23)	93,47	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.516.991.649,68)	(21.047.755.139,23)	93,47	

B. Penjelasan Per Pos LRA

B.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja tidak langsung pada semester II (dua) tahun anggaran 2019 adalah sebesar **Rp 6.500.305.839,68 (enam milyar lima ratus juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh delapan)** dengan realisasi belanja sebesar **Rp 5.958.134.145,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh lima).**

Realisasi keuangan belanja tidak langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,66 % yang dipergunakan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang, yang terdiri dari PNS golongan IV sebanyak 9 orang , PNS golongan III sebanyak 29 orang, PNS golongan II sebanyak 10 orang dengan jumlah tanggungan sebanyak 106 orang terdiri dari

isteri/suami sebanyak 39 orang dan anak sebanyak 67 orang.

Total anggaran belanja tidak langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik sebesar 87% atau Rp 844.677.738,12 dari anggaran tahun 2018.

Rincian penggunaan belanja pegawai :

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.117.843.527,00
- Tunjangan Keluarga	242.566.886,00
- Tunjangan Jabatan	143.420.000,00
- Tunjangan Fungsional	7.605.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	96.405.000,00
- Tunjangan Beras	131.080.200,00
- Tunjangan PPh/Khusus	4.751.475,00
- Pembulatan Gaji	37.401,00
- Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	17.380.656,00
- Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	60.546.400,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.117.665.600,00
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif	
- lainnya	18.832.000,00
Total Belanja Pegawai	5.958.134.145,00

B.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan anggaran belanja langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semester II (dua) tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 15.443.013.017,00 (lima belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu tujuh belas rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp 14.540.286.579,23 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen).**

Realisasi keuangan belanja langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semester II (dua) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 94,21% dengan rincian :

- Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	208.800.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor	50.462.075,00
- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.365.000,00
- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.300.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00
- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.475.000,00
- Belanja Pengisian Tabung Gas	3.840.000,00
- Belanja Pengisian ulang air galon	6.500.000,00
- Belanja Bahan arsip	8.325.000,00
- Belanja listrik	77.922.680,00
- Belanja surat kabar/majalah	12.987.000,00
- Belanja paket/pengiriman	1.093.500,00
- Belanja Spanduk	2.910.000,00
- Belanja jasa kontribusi	6.100.000,00
- Belanja Jasa Service	5.905.000,00
- Belanja Penggantian Suku Cadang	6.996.000,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.434.000,00
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.915.000,00

- Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.000.000,00
- Belanja Accu	1.140.000,00
- Belanja cetak	7.891.900,00
- Belanja Penggandaan	15.170.900,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00
- Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	14.400.000,00
- Belanja makanan dan minuman rapat	15.080.000,00
- Belanja makanan dan minuman tamu	17.342.500,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.300.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.168.183.613,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah	604.541.442,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.155.000,00
- Belanja pemeliharaan komputer	9.995.000,00
- Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	89.806.740,46
- Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	7.500.000,00
- Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	199.290.410,18
- Belanja pemeliharaan AC	5.455.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00
- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	9.045.601.323,32
- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.443.202.495,27
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.300.000,00
- Belanja Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00
- Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	325.600.000,00
Total Belanja Barang dan Jasa	14.540.286.579,23

B.3. Belanja Peralatan dan mesin

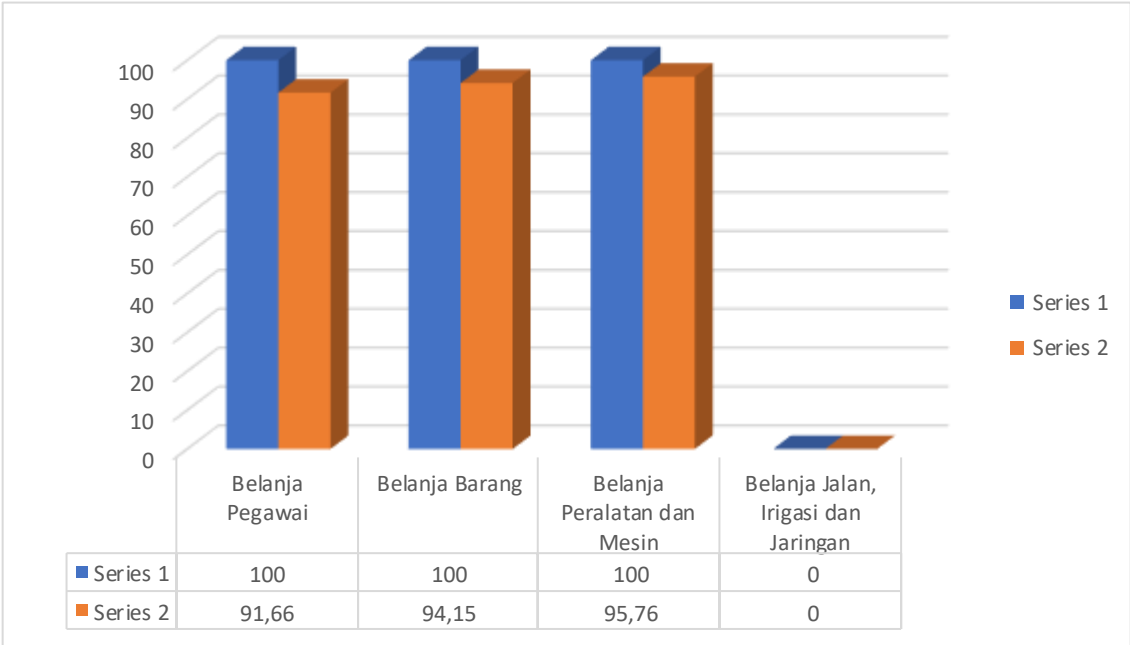
Belanja Peralatan dan Mesin pada semester II (dua) tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp 573.672.793,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp 549.334.415,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah)** atau sebesar 95,76% dengan rincian :

- Belanja modal Pengadaan mesin tik	2.750.000,00
- Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	5.200.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	149.350.000,00
- Belanja modal Pengadaan almari	26.200.000,00
- Belanja modal Pengadaan filling kabinet	18.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Kanopi	24.930.015,00
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Survey	69.210.000,00
- Belanja modal Pengadaan komputer/PC	48.318.500,00
- Belanja modal Pengadaan komputer note book	29.945.400,00
- Belanja modal Pengadaan printer	11.112.000,00
- Belanja modal Pengadaan scaner	21.300.000,00
- Belanja modal Pengadaan monitor/display	14.800.000,00
- Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	19.495.000,00
- Belanja modal Pengadaan meja kerja	21.750.000,00
- Belanja modal Pengadaan meja rapat	34.842.000,00
- Belanja modal Pengadaan kursi kerja	22.317.000,00
- Belanja modal Pengadaan kursi rapat	29.814.500,00
Total Belanja Peralatan dan Mesin	549.334.415,00

B.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada semester II (dua) tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 0,00 (nol rupiah)**

Tabel 5. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019



BAB III

PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

A. Penjelasan Umum Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu pada Dinas OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk semester II (dua) yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 :

Tabel 6. Neraca Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2019 dan 2018

NERACA PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG Per 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Rupiah)					
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
URAIAN	2019	2018	URAIAN	2019	2018
ASET			JUMLAH ASET LAINNYA	2.111.864.417,00	2.123.989.417,00
ASET LANCAR			JUMLAH ASET	25.661.027.568,92	25.916.058.565,92
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	KEWAJIBAN		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas di BLUD	0,00	0,00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	Utang Bunga	0,00	0,00
Selaras Kas	0,00	0,00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	0,00	0,00	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	Utang Beban	230.417.600,00	178.824.000,00
Selaras Kas	0,00	0,00	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	230.417.600,00	178.824.000,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Rutang Pendapatan	0,00	0,00	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Rutang Lainnya	0,00	0,00	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Rutang	0,00	0,00	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	JUMLAH KEWAJIBAN	230.417.600,00	178.824.000,00
Persediaan	16.735.255.000,00	16.732.168.000,00	EKUITAS		
JUMLAH ASET LANCAR	16.735.255.000,00	16.732.168.000,00	EKUITAS	25.430.609.968,92	25.737.234.565,92
INVESTASI JANGKA PANJANG			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	25.661.027.568,92	25.916.058.565,92
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00			
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00			
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00			
Dana Bergulir	0,00	0,00			
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00			
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00			
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00			
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00			
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00			
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00			
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00			
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00			
ASET TETAP					
Tanah	46.750.135,00	46.750.135,00			
Peralatan dan Mesin	2.044.933.096,92	1.677.173.696,92			
Gedung dan Bangunan	3.581.830.000,00	3.581.830.000,00			
Jalan, Trigasi, dan Jaringan	2.627.912.000,00	2.627.912.000,00			
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00			
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00			
Akumulasi Penyusutan	(1.487.517.080,00)	(873.764.683,00)			
JUMLAH ASET TETAP	6.813.908.151,92	7.059.901.148,92			
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0,00	0,00			
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00			
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00			
Kembaraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00			
Aset Tidak Berwujud	21.218.750,00	33.343.750,00			
Aset Lain-lain	2.090.645.667,00	2.090.645.667,00			

B. Penjelasan Per Pos Neraca

B.1. Aset

B.1.1. Aset Lancar

Aset lancar OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah **Rp 16.735.255.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Persediaan mengalami kenaikan dari tahun 2018 disebabkan adanya stock persediaan pada alat tulis kantor dan alat kebersihan.

Jumlah persediaan belum mengalami pengurangan karena sampai saat ini masih dilakukan proses Serah Terima Barang Ke Masyarakat dan Juga Kepada Pihak Ketiga. Rincian Persediaan

tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Laporan Stock Opname Persediaan Tahun Anggaran 2019

STOCK OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN												
s.d TRIWULAN IV (KEEMPAT)												
NO	Nama Barang	Satuan	Saldo Awal (01 Jan. 2019)		Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2019)							Ket
			Jumlah	Harga	Terima		Keluar		Saldo Akhir			
					Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Jumlah	Total Harga	Jumlah	Total Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ATK											
1	Kertas HVS F4 SIDU	dus			16	Rp 250.000	Rp 4.000.000,00	15	Rp 3.750.000,00	1	Rp 250.000,00	
2	Kertas HVS A4 SIDU	dus			16	Rp 225.000	Rp 3.600.000,00	13	Rp 2.925.000,00	3	Rp 675.000,00	
3	Tinta refill Epson 664 (warna)	botol			18	Rp 95.000	Rp 1.710.000,00	14	Rp 1.330.000,00	4	Rp 380.000,00	
4	Tinta refill Epson 664 (hitam)	botol			16	Rp 95.000	Rp 1.520.000,00	12	Rp 1.140.000,00	4	Rp 380.000,00	
5	Binder Clip 107	gros			10	Rp 50.000	Rp 500.000,00	9	Rp 450.000,00	1	Rp 50.000,00	
6	Binder Clip 200	kotak			36	Rp 15.000	Rp 540.000,00	33	Rp 495.000,00	3	Rp 45.000,00	
7	Binder Clip 155	kotak			36	Rp 18.000	Rp 648.000,00	35	Rp 630.000,00	1	Rp 18.000,00	
8	Pena Biasa	kotak			4	Rp 30.000	Rp 120.000,00	2	Rp 60.000,00	2	Rp 60.000,00	
9	Ordner Bantex	dus			11	Rp 230.000	Rp 2.530.000,00	8	Rp 1.840.000,00	3	Rp 690.000,00	
10	Map Biasa (stopmap)	pak			10	Rp 50.000	Rp 500.000,00	6	Rp 300.000,00	4	Rp 200.000,00	
11	Isi Staples 23/10	kotak			12	Rp 18.000	Rp 216.000,00	7	Rp 126.000,00	5	Rp 90.000,00	
13	Amplop Putih Garda	kotak			4	Rp 27.000	Rp 108.000,00	2	Rp 54.000,00	2	Rp 54.000,00	
12	staples no 10	buah			4	Rp 16.000	Rp 64.000,00	2	Rp 32.000,00	2	Rp 32.000,00	
	ALAT KEBERSIHAN											
2	wipoll	bungkus			10	Rp 15.000	Rp 150.000,00	7	Rp 105.000,00	3	Rp 45.000,00	
3	Super Pell	bungkus			10	Rp 19.000	Rp 190.000,00	8	Rp 152.000,00	2	Rp 38.000,00	
5	Sunlight	bungkus			10	Rp 15.000	Rp 150.000,00	8	Rp 120.000,00	2	Rp 30.000,00	
10	Tissu Jolly @700 gr	ball			11	Rp 25.000	Rp 275.000,00	9	Rp 225.000,00	2	Rp 50.000,00	
	Barang yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga											
1	Optimalisasi SPAM di Desa Air Mesu	Paket	1	Rp 964.525.000,00						1	Rp 964.525.000,00	BAST (PHO) Nomor : 620/207/SPAM-BEL/PAN_PHO/CKP/D PRKP/ tgl 24/10/2017
	- Supervisi/Pengawasan Optimalisasi SPAM Desa Air Mesu	Paket		Rp 49.896.000,00							Rp 49.896.000,00	BASTB Nomor : BASTB/SPAM/CKP/D PRKP tgl 14/11/2017
2	Optimalisasi SPAM IKK Sungailiat	Paket	1	Rp 908.244.000,00						1	Rp 908.244.000,00	BAST (PHO) Nomor : 640/140/PHO/DPRK P/CKP/APBD/2017 tgl 04/09/2017
	- Supervisi/Pengawasan Optimalisasi IKK Sunagailliat	Paket		Rp 49.410.000,00							Rp 49.410.000,00	BASTB Nomor : 202/BASTB/SPAM/CKP/DPRKP tgl 13/10/2017
3	Penigkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab.Bangka dan Bangka Barat	Unit	32	Rp 1.835.339.000,00						32	Rp 1.835.339.000,00	BASTB Nomor : 602/350/PAN-PHO/PR-DPRKP/APBD/2018 Tanggal 10-10-2018
4	Penigkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab.Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Unit	32	Rp 1.855.000.000,00						32	Rp 1.855.000.000,00	BASTB Nomor : 602/361/PAN-PHO/PR-DPRKP/APBD/2018 Tanggal 21-12-2018
5	Penigkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab.Belitung dan Belitung Timur	Unit	32	Rp 1.895.279.000,00						32	Rp 1.895.279.000,00	BASTB Nomor : 602/361/PAN-PHO/PR-DPRKP/APBD/2018 Tanggal 13-11-2018
6	Penigkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang	Unit	82	Rp 4.779.533.000,00						82	Rp 4.779.533.000,00	BASTB Nomor : 602/350/PAN-PHO/PR-DPRKP/APBD/2018 Tanggal 15-11-2018
7	Pekerjaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana Kab.Belitung Timur	Unit	75	Rp 4.199.942.000,00						75	Rp 4.199.942.000,00	BASTB Nomor : 602/460/PAN-PHO/PR-DPRKP/APBD/2018 Tanggal 28-12-2018
8	Pengkatan Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah Desa Penutuk Kab.Bangka Selatan	Paket	1	Rp 195.000.000,00						1	Rp 195.000.000,00	BASTB Nomor : 600/350/Perutuk/PAN-PHO/CKP-DPRKP/APBD/X/2018 Tanggal 03-10-2018
	TOTAL		256	Rp 16.732.168.000,00	234		Rp 16.821.000,00	190	Rp 13.734.000,00	300	Rp 16.735.255.000,00	

B.1.2. Aset Tetap

Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah sebesar **Rp 6.813.908.151,92** (*enam milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen*), kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar **Rp 7.059.901.148,92** yaitu akumulasi penyusutan yang bertambah di tahun 2019 sebesar **Rp 613.752.397,00**. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp 549.334.415,00 terdapat selisih aset sebesar Rp 181.575.015,00 dengan rincian :

Aset Tahun 2018	7.059.901.148,92
Belanja Modal Tahun 2019	549.334.415,00
	7.609.235.563,92
Aset Tahun 2019	6.813.908.151,92
	795.327.412,00
Penyusutan Tahun 2019	613.752.397,00
Selisih	181.575.015,00
Keterangan Selisih :	
Reklasifikasi	40.290.015,00
Lelang 4 (empat) unit motor di BAKUDA	141.285.000,00
	181.575.015,00

Untuk aset peralatan dan mesin sudah bisa ditetapkan sebagai aset tetapi untuk jalan, irigasi dan jaringan masih dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan asetnya akan diakui setelah pekerjaan konstruksi selesai 100%. Aset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 2 dengan kode barang 02.03.01.05.01 sebanyak 6 unit merk yamaha new aerox sudah diserahkan ke BAKUDA bagian Aset Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai keseluruhan Rp 141.285.000,00.

Aset tanah bangunan kantor pemerintah yang dipergunakan oleh Balai Cipta Karya, Kementerian PUPR senilai Rp 25.988.000,25 sudah dilakukan proses alih status termasuk Aset jalan lingkungan/halaman di Dermaga Polair, Air Anyir senilai Rp 1.731.660.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berdasarkan laporan penyusutan aset tetap pada semester kedua tahun anggaran 2019 senilai Rp 1.487.517.080,00.

B.2. Kewajiban

Pada neraca OPD semester 2 (dua) tahun anggaran 2019 terdapat kewajiban jangka pendek (utang beban) TPP Bulan Desember 2019 sebesar **Rp 230.417.600,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)** yang akan dibayarkan pada tahun 2020.

Sementara untuk kewajiban jangka panjang belum ada progres yaitu sebesar Rp. 0,00 (nol).

B.3. Ekuitas

Ekuitas OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp 25.430.609.968,92 (dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen)** dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah aset	Rp. 25.661.027.568,92
- Dikurangi kewajiban	(Rp 230.417.600,00)
- Ekuitas SKPD	Rp. 25.430.609.968,92

Terbilang : **dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen.**

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. Penjelasan Umum Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 (Semester II).

Dari Kegiatan Operasional Dinas PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0,00, Beban sebesar **Rp 21.218.361.399,23** sedangkan defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp 21.218.361.399,23** sehingga Defisit-LO sebesar **Rp 21.218.361.399,23**. Kondisi ini terjadi kenaikan sebesar **118.40%** atau sebesar **Rp 11.496.843.706,23**.

Tabel 8. Laporan Operasional Tahun 2019 dan 2018

<div><div><div>S</div><div>27</div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div><div>LAPORAN OPERASIONAL</div><div>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018</div></div></div>					
<div>Urusan Pemerintahan : 1URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</div> <div>Bidang Pemerintahan : 1.04PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</div> <div>Unit Organisasi : 1.04.01DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</div>					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	21.218.361.399,23	9.715.455.193,00	11.502.906.206,23	118,40
9.1.1	Beban Pegawai - LO	6.335.327.745,00	5.653.998.985,00	681.328.760,00	12,05
9.1.2	Beban Persediaan	11.666.769.193,59	270.423.425,00	11.396.345.768,59	4.214,26
9.1.2	Beban Jasa	431.443.195,00	1.785.006.500,00	(1.353.563.305,00)	(75,83)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	365.592.150,64	146.840.500,00	218.751.650,64	148,97
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	1.772.725.055,00	903.620.649,00	869.104.406,00	96,18
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	435.193.000,00	(435.193.000,00)	(100,00)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	646.504.060,00	520.372.134,00	126.131.926,00	24,24
LAPORAN OPERASIONAL					
Halaman 1 dari 2					

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Bidang Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Unit Organisasi : 1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(21.218.361.399,23)	(9.715.455.193,00)	(11.502.906.206,23)	118,40
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21.218.361.399,23)	(9.715.455.193,00)	(11.502.906.206,23)	118,40
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(21.218.361.399,23)	(9.715.455.193,00)	(11.502.906.206,23)	118,40

B. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

B.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Semester II Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar minus (Rp 21.218.361.399,23) dan (Rp 9.715.455.193,00). Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dikurangi dengan Beban Operasional , sehingga kondisi sekarang terjadi kenaikan sebesar 118.34% atau sebesar Rp 11.502.906.206,23.

B.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Semester II Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 . Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

B.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada Semester II Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 .

Tabel. 9 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Semester II		Naik/(Turun)	
	Tahun 2019	Tahn 2018	Jumlah	%
Pendapatan Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah				

B.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional pada Semester II Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 21.218.361.399,23 dan Rp 9.715.455.193,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2019.

Tabel 10. Rincian Beban Operasional Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Semester II		Naik/(Turun)	
	Tahun 2019	Tahun 2018	Jumlah	%
Beban Pegawai	6.335.327.745,00	5.653.998.989,00	681.328.756,00	12,05
Beban Persediaan	11.666.769.193,59	270.423.425,00	11.396.345.768,59	4.214,26
Beban Jasa	431.443.195,00	1.785.006.500,00	-1.353.563.305,00	-75,83
Beban Pemeliharaan	365.592.150,64	146.840.500,00	218.751.650,64	148,97
Beban Perjalanan Dinas	1.772.725.055,00	903.620.649,00	869.104.406,00	96,18
Beban Hibah	-	435.193.000,00	-435.193.000,00	-100
Beban Penyusutan dan Amortisasi	646.504.060,00	520.372.134,00	126.131.926,00	24,24
Jumlah	21.218.361.399,23	9.715.455.197,00	11.496.843.702,23	118,34

B.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah beban pegawai pada tahun 2019 dan tahun 2018 masing-masing sebesar Rp 6.335.327.745,00 dan Rp 5.653.998.989,00 atau mengalami kenaikan/penurunan sebesar 12,05%.

Tabel 11. Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2019

Uraian Beban Pegawai	Jumlah
Beban Gaji dan Tunjangan	6.335.327.745,00
<i>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi</i>	2.117.843.527,00
<i>Tunjangan Keluarga</i>	242.566.886,00
<i>Tunjangan Jabatan</i>	143.420.000,00
<i>Tunjangan Fungsional</i>	7.605.000,00
<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	96.405.000,00
<i>Tunjangan Beras</i>	131.080.200,00
<i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	4.751.475,00
<i>Pembulatan Gaji</i>	37.401,00
<i>Beban iuran BPJS Ketenagakerjaan</i>	17.380.656,00
<i>Beban iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan</i>	60.546.400,00
<i>Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</i>	3.169.259.200,00
<i>Beban Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya</i>	18.832.000,00
<i>Beban Pegawai Tidak Tetap</i>	325.600.000,00
Jumlah Beban Pegawai	6.335.327.745,00

B.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.

Jumlah beban persediaan di tahun 2019 dan tahun 2018 adalah Rp 11.666.769.193,59 dan Rp 270.423.425 atau mengalami kenaikan/penurunan sebesar 4.214,26%.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga belum diakui sebagai beban persediaan.

Tabel 12. Rincian Beban Persediaan Tahun 2019

Uraian Beban Persediaan	Jumlah
Beban Persediaan	11.666.769.193,59
<i>Beban Alat Tulis Kantor</i>	47.538.075,00
<i>Beban Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</i>	6.365.000,00
<i>Beban Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya</i>	9.300.000,00
<i>Beban Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</i>	14.837.000,00
<i>Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran</i>	2.475.000,00
<i>Beban Pengisian Tabung Gas</i>	3.840.000,00
<i>Beban Pengisian Air Galon</i>	6.500.000,00
<i>Beban Bahan Arsip</i>	8.325.000,00
<i>Beban Cetak</i>	7.891.900,00
<i>Beban Penggandaan</i>	15.170.900,00
<i>Beban Makanan dan Minuman Rapat</i>	15.080.000,00
<i>Beban Makanan dan Minuman Tamu</i>	17.342.500,00
<i>Beban Makanan dan Minuman Pelatihan</i>	23.300.000,00
<i>Beban Yang Akan diserahkan ke Masyarakat</i>	9.045.601.323,32
<i>Beban Yang Akan diserahkan kepada Pihak Ketiga</i>	2.443.202.495,27
Jumlah Beban Persediaan	11.666.769.193,59

B.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa terdiri dari jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah beban jasa di tahun 2019 dan tahun 2018 adalah Rp 431.443.195,00 dan Rp 1.785.006.500,00 atau mengalami kenaikan/penurunan sebesar -75,83%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.

Tabel 13. Rincian Beban Jasa Tahun 2019

Uraian Beban Jasa	Jumlah
<i>Beban Listrik</i>	77.922.680,00
<i>Beban Surat Kabar/Majalah</i>	12.987.000,00
<i>Beban Paket/Pengiriman</i>	1.093.500,00
<i>Beban Spanduk</i>	2.910.000,00
<i>Beban Jasa Kontribusi</i>	6.100.000,00
<i>Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</i>	12.000.000,00
<i>Beban sewa kamar hotel/wisma/penginapan</i>	14.400.000,00
<i>Beban Jasa Konsultan Perencanaan</i>	45.000.000,00
<i>Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.</i>	15.300.000,00
<i>Beban Uang saku kegiatan/rapat</i>	10.000.000,00
<i>Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap</i>	208.800.000,00
<i>Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra</i>	24.930.015,00
Jumlah Beban Jasa	431.443.195,00

B.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Jumlah beban pemeliharaan di tahun 2019 dan tahun 2018 adalah Rp 365.592.150,64,00 dan Rp 146.840.500,00 atau mengalami kenaikan/penurunan sebesar 148,97%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pekerjaan pada kegiatan pemeliharaan konstruksi jaringan air dan pemeliharaan konstruksi bangunan sehingga diperlukan anggaran yang lebih besar dari tahun 2018.

Tabel 14. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019

Uraian Beban Pemeliharaan	Jumlah
Beban Jasa Service	5.905.000,00
Beban Penggantian Suku Cadang	6.996.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.434.000,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.915.000,00
Beban Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.000.000,00
Beban Accu	1.140.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.155.000,00
Beban pemeliharaan komputer	9.995.000,00
Beban pemeliharaan konstruksi jaringan air	89.806.740,46
Beban pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	7.500.000,00
Beban pemeliharaan konstruksi bangunan	199.290.410,18
Beban pemeliharaan AC	5.455.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	365.592.150,64

B.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Jumlah beban Perjalanan Dinas di tahun 2019 dan tahun 2018 adalah Rp 1.772.725.055,00 dan Rp 903.620.649,00 atau mengalami kenaikan/penurunan sebesar 96,18%. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang menyebar di beberapa tempat sehingga menyebabkan meningkatnya beban perjalanan dinas.

Tabel 15. Rincian beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019

Uraian Beban Perjalanan Dinas	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas	1.772.725.055,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.168.183.613,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	604.541.442,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	1.772.725.055,00

B.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah/Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Jumlah beban hibah pada Tahun 2019 adalah Rp 0,00

B.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 646.504.060,00 dan Rp 520.372.134,00.

Tabel 16. Rincian beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019


Uraian Beban Penyusutan	Jumlah
<i>Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor</i>	88.756.428,00
<i>Beban Penyusutan Alat Ukur</i>	3.080.000,00
<i>Beban Penyusutan Alat Kantor</i>	29.620.000,00
<i>Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga</i>	74.976.963,00
<i>Beban Penyusutan Komputer</i>	57.865.455,00
<i>Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</i>	33.097.415,00
<i>Beban Penyusutan Alat Studio</i>	11.663.333,00
<i>Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium</i>	241.666,00
<i>Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan</i>	2.450.000,00
<i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	35.818.300,00
<i>Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	35.818.300,00
<i>Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam</i>	260.391.200,00
<i>Beban Penyusutan Jaringan Listrik</i>	600.000,00
<i>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya</i>	12.125.000,00
Jumlah Beban Penyusutan	646.504.060,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

A. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang

Tabel 17. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 dan 2018

		PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	
		LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
		UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018	
		(Dalam Rupiah)	
Urusan Pemerintahan	: 1 . 04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Unit Organisasi	: 1 . 04 . 01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Sub Unit Organisasi	: 1 . 04 . 01 . 01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
URAIAN		2019	2018
EKUITAS AWAL		25.737.234.565,92	9.885.769.032,92
SURPLUS/DEFISIT-LO		(21.218.361.399,23)	(9.715.455.193,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Perubahan Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daer		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Persediaan		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
Dampak akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin		(15.360.000,00)	(22.000.000,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		20.626.663,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya		0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Piutang		0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Utang		0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan piutang		0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain Lain		0,00	(11.653.333,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Amortisasi Aset Tidak Bervujud		0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan Dana Bergulir		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		(141.285.000,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		21.047.755.139,23	25.600.574.059,00
EKUITAS AKHIR		25.430.609.968,92	25.737.234.565,92

B. Penjelasan Rinci Laporan Perubahan Ekuitas

B.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 Rp 25.737.234.565,92 berasal dari saldo ekuitas neraca per 31 Desember 2018 yang telah di audit

B.2 Surplus/defisit LO

Surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2019 sebesar -Rp 21.218.361.399,23 berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban tahun anggaran 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Laporan Operasional (LO).

B.3 Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 15.360.000,00 disebabkan adanya reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18. Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Alat ukur lainnya	(1.900.000,00)
Alat Kantor lainnya	(3.500.000,00)
Alat Pemadam Kebakaran	(2.200.000,00)
Alat Laboratorium Logam, mesin, listrik	(4.250.000,00)
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	(1.110.000,00)
Alat Keamanan	(1.700.000,00)
Alat Perlindungan	(700.000,00)
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019	(15.360.000,00)

B.4 Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 20.626.663,00** .

B.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 141.285.000,00 yaitu Aset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 2 dengan kode barang 02.03.01.05.01 sebanyak 6 unit merk yamaha new aerox sudah diserahkan ke BAKUDA bagian Aset Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai keseluruhan Rp 141.285.000,00.

B.6 Kewajiban untuk di konsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk di konsolidasikan adalah sejumlah **Rp 21.047.755.139,23** yaitu jumlah realisasi seluruh belanja selama tahun 2019. Sebagaimana dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

B.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp 25.430.609.968,92** berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.737.234.565,92 ditambah surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2019 sebesar -Rp 21.218.361.399,23 ditambah Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar – Rp 15.360.000,00 Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 20.626.663,00, Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar – Rp 141.285.000,00 dan ditambah Kewajiban untuk di konsolidasikan sebesar Rp 21.047.755.139,23.

Tabel 19. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018
Ekuitas Awal	25.737.234.565,92	9.885.769.032,92
Surplus/defisit LO	(21.218.361.399,23)	(9.715.455.193,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(15.360.000,00)	(22.000.000,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	20.626.663,00	-
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain	-	(11.653.333,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	(141.285.000,00)	-
Kewajiban untuk di konsolidasikan	21.047.755.139,23	25.600.574.059,00
Ekuitas Akhir	25.430.609.968,92	25.737.234.565,92

BAB VI PENUTUP

Demikian laporan keuangan OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kami sampaikan sebagai bahan laporan wajib yang harus disampaikan pada semester II yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2019 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Kami sangat menyadari bahwa laporan yang kami buat ini belumlah sempurna, Kami mengharapkan tanggapan, masukan, saran, kritik yang mendukung dalam penyempurnaan pembuatan laporan ini dari para pengguna laporan, sehingga laporan keuangan ini dapat bermanfaat maksimal bagi kita semua.

Kami akan terus berupaya agar laporan keuangan ini untuk selalu disempurnakan di tahun-tahun mendatang agar dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan siap dipertanggungjawabkan.

Pangkalpinang, Desember 2019

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

RAKHMADI, S.Pd, M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 19641014 198903 1 012